Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara

A Model Showing The Dowry Owed Dispute of The People of Mandailing Natal North Sumatra

Azhari Akmal Tarigan*, Syukri Albani Nasution & Zubeir

Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji model-model penyelesaian pembayaran mahar berutang yang menjadi tradisi di sebagian masyarakat Mandailing Sumatera Utara. Masalah difokuskan pada bagaimana hukum bekerja dan efektif untuk membangun keteraturan baru dan akhirnya menciptakan keharmonisan dalam hal mahar berutang yang dijadikan penyelesaian dalam kawin lari lalu terjadi perceraian pada pernikahan tersebut. Guna mendekati masalah ini digunakan pendekatan sosioantropologi hukum. Penelitian ini juga termasuk ke dalam kategori penelitian hukum non doktrinal atau penelitian hukum empirik (sociolegal). Data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh adat dan beberapa partisipan yang melakukan praktik-praktik kawin lari (*Marlojong*) tersebut dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa mahar berutang yang dilakukan pada perkawinan *Marlojong* pada dasarnya bertujuan positif yaitu untuk mengikat hubungan rumah tangga antara suami dan istrinya agar tetap bersama selamanya. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa mahar berutang adalah sumber konflik yang tidak hanya melibatkan suami istri tetapi juga melibatkan dua keluarga besar. Ketika mahar berutang melahirkan konflik, maka jalan keluar yang ditempuh ada 3 (tiga) model penyelesaian.

Kata Kunci: Marlojong; Mahar Berutang; *Tuor*; Penyelesaian Sengketa.

Abstract

This article is to examine the models of settlement payments of dowry owed or mahar berutang that have become a tradition in some Mandailing communities in North Sumatra. This problem is focused on how the law works and is effective in establishing new order and ultimately creating harmony in the context of dowry owed in the case of a dowry owed which is used as a settlement in an elopement and then a divorce occurs in that marriage. This research is also included in the category of non-doctrinal legal research or empirical legal research (sociolegal). The data were obtained through in-depth interviews with traditional leaders and several participants who carried out the practices of elopement (*Marlojong*) and those are analyzed qualitatively. This study concludes that the dowry owed performed in the *Marlojong* marriage basically has a positive purpose, namely to bind the household relationship between husband and wife so that they remain together forever. However, in practice, there are several cases showing that dowry owed is a source of conflict that not only involves husband and wife but also involves two large families. When a dowry owed birth to a conflict, the solution taken is 3 settlement models.

Keywords: Marlojong; Dowry owed; *Tuor*; Dispute Resolution

How to Cite: Tarigan, A.A. Nasution, S.A. & Zubeir. (2021). Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara. *Jurnal Mercatoria*, Desember 2021. 14 (2): 56-70.

PENDAHULUAN

Hampir di semua tradisi masyarakat nusantara mengenal konsep mahar dalam perkawinan kendatipun dengan istilah yang berbeda-beda. Di Aceh mahar perkawinan dinamakan *jinamee*, di Sulawesi Selatan dinamakan *sunrang* dan *sompa*, di Minahasa dinamakan *hoko*, serta di daerah melayu dikenal dengan uang antaran yang artinya (Haar, 1962). Di Jawa pemberian seperti ini disebut *tukon*, sementara di Kalimantan Tengah disebut *palaku* (Sudiyat, 1962). Masyarakat batak menyebutnya *sinamot* atau *Tuor* dalam etnis Mandailing (Khairani, 2019; Manik, 2012).

Di Dalam hukum Islam (Halimah, 2017) kendatipun mahar tidak termasuk di dalam rukun perkawinan, namun mahar diposisikan sebagai *syart sihhah* dan *syart al-tamam* (syarat sempurna). Dalam praktiknya mahar, Ada kalanya disebut di dalam akad secara jelas dan disebut mahar *musamma* karena mahar ini lahir dari kesepakatan pengantin laki-laki dan perempuan atau keluarga kedua belah pihak (Kohar, 2016). Sementara itu terdapat mahar *mitsil*, mahar yang ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar itu belum ditetapkan jumlahnya (Halomoan, 2016).

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur di dalam pasal 30-38. Pada pasal 31 dinyatakan, "Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam". Selanjutnya pada Pasal 33 KHI juga dijelaskan bahwa pembayaran mahar boleh dilakukan secara tunai atau ditangguhkan, baik untuk sebagian maupun keseluruhan mahar, sesuai kesepakatan bersama (Abdurrahman, 1992). Para ulama-ulama fiqh pun sebenarnya sepakat dalam menetapkan bolehnya pemberian mahar secara kontan atau berutang ini, hanya saja

mereka memberikan istilah mahar tersebut dengan mahar *musamma mu'ajjal* (segera diberikan) atau mahar *musamma-muajjal* (ditangguhkan pemberiannya) (Halimah, 2015).

Konsep mahar berutang pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan pihak suami atau calon suami dalam melangsungkan sebuah pernikahan, terutama apabila beban mahar yang dibebankan kepada mereka nilai angkanya tergolong mahal atau besar. Sehingga dengan cara berutang (dalam hal penyerahannya) memungkinkan pihak suami atau calon suami di kemudian hari untuk membayarnya, apakah secara lunas maupun dicicil sesuai kemampuannya. Namun selama mahar tersebut belum dilunasi maka selamanya akan menjadi beban utang bagi suami terhadap istrinya, kecuali istrinya telah rela mahar tersebut tidak lagi menjadi utang suaminya

Dalam adat Mandailing *Tuor* merupakan penyebutan mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang ditetapkan dengan perjanjian adat. Sedangkan di daerah Batak *Tuor* itu disebut dengan *sinamot* atau uang jujur dimana, jika seseorang sudah membicarakan *sinamot* sebagaimana itu sudah merupakan peristiwa adat untuk bermusyawarah *sinamot* (mas kawin). Sehingga menjadi marwah bagi seseorang perempuan apabila seorang laki-laki mampu memberikan *Tuor* dengan jumlah yang besar bagi calon istri. Demikian sebaliknya seorang istri akan amat berharga jika dibayar dengan *Tuor* jumlah yang besar kepada perempuan (Khairani, 2019).

Menjadi menarik untuk dikaji, karena ternyata fakta lain menyebutkan bahwa ada hubungan erat dari tradisi kawin lari atau Kawin *Marlojong* dengan nilai *Tuor* yang tinggi dan berefek kepada mahar berutang. Mahar berutang sekalipun terlihat sepele, tapi sebenarnya menyimpan banyak persoalan-persoalan,

baik dalam hal model berutangnya sebagian atau keseluruhan atau dalam hal jangka waktu batas pembayarannya, tertulis atau tidak, bahkan sampai kepada model penyelesaiannya seperti apa ketika nanti terjadi sengketa mahar. Tentu mengkajinya tidak cukup hanya melihat dari satu sudut pandang agama saja misalnya, tapi dari sudut pandang perundang-undangan, sosiologi hukum, antropologi hukum, bahkan dari sisi filosofisnya juga sebenarnya diperlukan.

Salah satu permasalahan yang biasanya muncul dari adanya mahar berutang ialah saat terjadinya perceraian maka akan terjadi sengketa tentang mahar berutang tersebut (Wilpa, 2012). Seringkali dalam penyerahan mahar berutang mahar yang ditanggihkan tidak ditulis dalam akta nikah karena mempelai wanita atau pihak keluarga wanita percaya pada pihak laki-laki bahwa pasti mahar berutang tersebut akan dilunasi di kemudian hari (Duwila, 2018). Secara yuridis, penegak hukum atau Pengadilan Agama sulit untuk membuktikan adanya utang dalam mahar tersebut dikarenakan jumlah mahar telah tercantum di dalam akta nikah yang sesuai dengan syariat Islam, dan biasanya perjanjian adat terkait mahar berutang tersebut tidak tertulis dengan jelas kapan utang mahar tersebut akan dilunasi (Duwila, 2018).

Studi terdahulu menyelidiki faktor penyebab seorang suami tidak melunasi mahar yang terutang sampai terjadinya perceraian antara lain: Pertama, faktor masalah ekonomi, dimana suami memiliki ekonomi yang rendah sehingga tidak mampu membayar utang mahar yang terlalu tinggi. Kedua, faktor sosial budaya, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa hukum adat menetapkan mahar yang terlalu tinggi. Ketiga, faktor pendidikan suami yang rendah sehingga ketika dalam pernikahan suami menganggap bahwa istri tidak memerlukan pelunasan utang mahar dikarenakan istri telah mengikhlaskannya, padahal membayar mahar kepada istri

seharusnya tidak perlu menunggu ditagih oleh istri karena mahar merupakan hak penuh seorang istri (Noor, 2017).

Salah satu kasus mahar berutang yang berujung sengketa yang peneliti temukan di lapangan ialah kasus penyelesaian sengketa mahar berutang di Pengadilan Agama Panyabungan, dimana saat menikah ada akta perjanjian sendiri yang dibuat kedua mempelai terkait *tuor* (mahar) dimana suami telah berutang *Tuor* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Adapun pelunasan *Tuor* akan dilunasi tanpa batas waktu yang jelas atau sepanjang adat. Kemudian mahar berutang ini menjadi masalah sengketa saat istri menggugat cerai suaminya hingga masalah ini sampai ke Pengadilan Agama dengan laporan nomor 192/Pdt.G/2010/PA.Pyb dengan perkara pokok tentang cerai gugat yang dikomulasikan dengan gugatan tentang kekurangan mahar. Dalam proses persidangan Tergugat (suami) mengakui keberadaan perjanjian tersebut, namun ia tidak bersedia melunasi.

Di masyarakat Mandailing Natal tradisi mahar berutang ini masih sering dijumpai dalam praktek perkawinan, terutama pada perkawinan yang sifatnya kawin lari. Terlepas dari tujuan dan nilai-nilai kearifan yang dikandung tradisi tersebut, namun tanpa disadari hak-hak perempuan sebagai istri terhadap maharnya menjadi terabaikan, terlebih lagi apabila solusi untuk menyelesaikan persoalan mahar berutang tidak ada dari adat setempat maupun perundang-undangan yang ada. Ini artinya potensi akan terzhalimnya hak-hak istri terhadap mahar pernikahannya sangat besar, karena tidak ada aturan dan perhatian yang jelas tentang bagaimana mendapatkan hak-hak tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum empirik atau penelitian hukum non doktrinal atau sering juga disebut sosio legal. Studi ini berbeda dengan penelitian hukum normatif, yang melihat hukum sebagai norma, asas atau nilai-nilai filosofisnya. Penelitian hukum empirik akan melihat efektifitas hukum di dalam masyarakat dengan segala dinamikanya dan bagaimana hukum dapat bekerja untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Dalam konteks inilah di dalam studi antropologi hukum, dinyatakan bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan sengketa yang hadir di masyarakat.

Dari sisi jenisnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara (*interview*) yang mendalam (*indepth interviews*) dengan proses tanya jawab yang terbuka dan mendalam (EL, 2012). Peneliti juga melakukan observasi, mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki (Mardalis, 2008). Adapun yang menjadi partisipannya adalah beberapa tokoh adat sekaligus tokoh agama, tokoh adat saja dan mereka-mereka yang secara terpilih, pernah melakukan praktik mahar berutang. Sedangkan teknik analisis data, peneliti melakukan tiga langkah analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sebagaimana yang berlaku di dalam penelitian kualitatif pada umumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di lingkungan adat Mandailing, kedudukan mahar di dalam perkawinan tidak saja penting melainkan menjadi satu keharusan yang mesti ada. Pertimbangan mahar bukan hanya dalam konteks hukum namun juga memiliki dimensi sosiologis bahkan juga magis. Menurut pemuka adat, mahar itu ada dua jenis, yaitu mahar yang diadakan sewaktu menikah dan mahar secara adat yang tidak disebutkan di dalam

akad nikah. Dalam pandangan adat *Tuor* (mahar) itu disebut *sere* (emas) dan *sere* tersebut ada dua juga, yaitu *serenalamot* (emas halus) dan *serenagodang* (emas besar). *Serenalamot* sebagai *Tuor* (mahar) yang dimaksud termasuklah mahar yang diadakan sewaktu akad nikah ditambah lagi dengan *Tuor* adat *sere sibilang-bilangon* banyak bilangannya *3 tail 3 pa*, atau *5 tail 5 pa*. Bahkan ditambah lagi *orbo sabara* (kerbau sekandang), *manuk na habangan dinding* (ayam dewasa jumlahnya banyak). Mereka mewajibkan untuk menyediakan *serenagodang* yaitu anak *boru* dan *akuandar* (*kahanggi*) yang dikemudian hari sebagai penanggung jawab perkawinan kedua *anak pangoli* (kedua mempelai) (Hasnul Arifin Nasution, Tokoh Adat di Mandailing Natal, 2020).

Jenis-jenis *batang boban* yang akan diserahkan ada 2 (dua) macam yaitu *sere na godang* sebagai *okuandar* (penjamin). *Sere na godang* artinya harus dengan jumlah besar dengan pengertian bukan berarti emas dalam arti sebenarnya, tetapi berupa benda berharga yang terdiri dari: *Horbo sabara* (kerbau satu kandang), *Lombu sabara* (lembu satu kandang), *Emesa hopuk* (padi satu lumbung), *Sere* (emas) 30 tail ,30 pa, atau 10 tail , 10 pa, 1 tail, 1 pa. Biasanya besar kecilnya kuantitas mahar yang tidak disebutkan di dalam akad itu tergantung pada status (Hasnul Arifin Nasution, Tokoh Adat di Mandailing Natal, 2020).

Apa yang disebutkan dengan *sere na godang* ini sebenarnya hanyalah sebagai simbol yang tidak harus dipenuhi oleh keluarga laki-laki (calon *anak boru*). Oleh sebab itu apa yang telah dijanjikan sebenarnya tidak harus semuanya diserahkan, kecuali sejumlah uang (menurut kebiasaan) yang disebut dengan *sere na menek*. Jadi untuk yang tidak terpenuhi tersebut dianggap utang sepanjang masa. Itulah sebabnya *anak boru* disebut berutang sepanjang *aek sepanjang rura*. *Aek* (sungai) dan *rura*

(lembah), berarti utang yang terus sepanjang masa dan sebesar lembah (tidak terkira).

Berkenaan dengan hal ini, partisipan mengatakan;

"Satombal nadapot antong ami adongkon, satombal naso dapot antong mandali ma ami diparadatan".

"Segala yang bisa kami dapat akan kami serahkan, tapi yang tak mungkin kami dapat maka berutanglah kami secara adat".

Menurut Pinayungan Pulungan inilah sebagai dasar munculnya istilah utang sepanjang adat artinya utang yang tidak akan mampu dibayar karena ketidakmungkinan untuk menyediakannya (Mangaraja Pinayungan Pulungan Tokoh adat Mandailing Natal, September 2020)

"Ima dabo sabotulna inda dong sabotulna lunas utang ni anak boruna tu mora na, sapanjang aek sapanjang rura."

"Itulah makanya tidak akan pernah lunas utang anak borunya ke moranya, karena utang adat ini dianggap sapanjang aek sapanjang rura (artinya tidak ada putusnya)."

Sere na godang ini secara simbolik diserahkan dengan jaminan berupa orang dari perwakilan keluarga laki-laki yaitu *kahanggi* dan anak *boru*. Pihak yang menjadi jaminan ini adalah sebagai jaminan (*okuandar*), apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar janji yang disepakati. (Hasnul Arifin Nasution, Tokoh Adat di Mandailing Natal, 2020). Semua persyaratan *Tuor* (mahar) secara adat yang mereka persyaratkan akan disampaikan pada waktu *markobarpatibal sere* (penyerahan mahar) dan bukan diucapkan pada waktu

akad nikah dilaksanakan. Jadi dalam pandangan adat *Tuor* yang diucapkan sewaktu akad nikah itu adalah *Tuor* (mahar) wajib yang dimaksud dalam ajaran Islam. Sementara *Tuor* tambahan secara adat bukanlah termasuk kewajiban secara syar'i, tapi kewajiban secara adat. Oleh karena itu dalam pandangan adat *Tuor* tambahan tersebut tidak akan mampu disediakan, selain karena jumlahnya banyak juga memuat sesuatu yang sulit dibuat nilai angkanya, seperti 3 *tail 3 pa* atau 5 *tail 5 pa*. Sehingga dalam konsep adat *Tuor* itu, laki-laki yang menjadi *anak boru* dan akan berutang sepanjang adat, atau dalam istilah lain dikatakan tidak akan pernah selesai utang *anak borunya* ke *mora* nya. Utang sepanjang adat adalah utang selamanya tanpa ada lagi batas yang bisa diukur, karena ketidakmungkinan juga untuk membayarnya, sebab nilainya juga tidak bisa dipastikan secara matematis (Kholilul Yaqin Naution, Tokoh Adat Mandailing Natal, September 2020).

Dalam kaitannya dengan mahar berutang yang diadakan sewaktu akad nikah juga dipahami sebagai mahar berutang sepanjang adat, namun apabila terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia maka mahar tersebut wajib dibayarkan lunas oleh suaminya. Namun menurut Kholilul Yakin sebagai Tokoh Adat Mandailing Natal (2020), beliau mengatakan bahwa utang mahar yang diadakan sewaktu menikah itu bukanlah utang sepanjang adat, karena utang sepanjang adat itu tidak ada batasnya, tapi utang tersebut adalah utang wajib secara agama, artinya wajib dibayar. Menurut Sogopan Siregar pada saat penyebutan *ijab qobul* mahar berutang ini tidak pernah menyebutkan batas waktu pembayaran mahar tersebut, namun utang tersebut tetap tercatat di buku nikah. Sebagai pertinggal untuk keluarga, mahar berutang ini sebagian ada yang menuliskannya di atas materai ada juga yang tidak menuliskannya dan hanya

bermodalkan saksi-saksi saja (Sogopan Siregar, Kepala Kantor KUA Siabu, September 2020).

Pelaksanaan Mahar Berutang dan Kasus-kasus

Praktik mahar berutang di Mandailing biasanya terjadi pada perkawinan model *Marlojong* (kawin lari). Faktor penyebab terjadinya kawin *Marlojong* adalah dikarenakan adanya ketidaksetujuan orang tua atas hubungan anak mereka, baik orang tua si laki-laki ataupun orang tua si perempuan. Begitu juga karena ketidakmampuan si laki-laki dalam menyediakan *Tuor* (mahar) pernikahan menjadi sebab terjadinya kawin *Marlojong* di Mandailing Natal ini. Menurut Sogopan Siregar angka *Tuor* (mahar) saat ini berkisar antara 20 juta-30 juta apabila dibayar tunai dan 10 juta-15 apabila dibayar berutang (Sogopan Siregar, Kepala Kantor KUA Siabu, September 2020).

Pernyataan di atas semakin diperkuat atas data yang ada di arsip KUA Kecamatan Siabu dimana di tahun 2020 sampai bulan Juli terdapat 3 kasus pernikahan dengan mahar berutang dengan angka mahar 10 juta berutang 5 juta, dan mahar 6 juta berutang 4 juta. Di sisi lain juga pengakuan langsung dari suami yang menikah dengan mahar berutang. Sebagaimana dikatakan oleh para partisipan dalam wawancara langsung dengan peneliti;

"Alasan baen naso mampu ma najolo so nga tarlehen Tuor on, harana dimasa i Tuor ni alak bagas dipangido alak tulangi 2,5 gram emas, sampe ari sadari on pe naso tarbayar dope baen harani parsuadaan, ujung-ujungna kawin marlojong doma so lalu na kawin" (Mualli Lubis, Tokoh Masyarakat Mandailing Natal, September 2020).
"Alasan karena ketidakmampuan lah dahulu Tuor ini tidak bisa saya

tunaikan, karena waktu itu Tuor istri saya 2,5 gram emas dan sampai hari ini pun belum ada yang bisa terbayar akibat keadaan tidak mampu, ujung-ujungnya kawin larilah kami biar tetap jadi kami kawin" (Mualli Lubis, Tokoh Masyarakat Mandailing Natal, September 2020).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh partisipan lainnya, ada 20 orang suami yang maharnya berutang dari berbagai kecamatan yang peneliti wawancarai. Semuanya dari perkawinan *marlojong* dengan alasan tak mampu memberikan *Tuor* kalau tunai dan tak direstui orangtua. Besarnya pasaran *Tuor* dan ketidakmampuan nampaknya menjadi penyebab utama terjadinya mahar berutang dan perkawinan *marlojong* di Mandailing Natal ini.

Jika melihat dari bentuk lafaz yang diucapkan pada saat akad nikah, tidak sedikit pun menyinggung batas waktu pembayaran utang mahar tersebut. Biasanya dalam sebuah transaksi utang piutang telah dituliskan berapa jumlah utang dan sampai kapan batas waktu pembayarannya. Menurut pengakuan Fahmi Nasution, tidak ada batas waktu pembayarannya, karena utang mahar ini adalah utang sepanjang adat, namun kalau terjadi perceraian maka utang ini wajib dibayar (Fahmi Nasution, Maharnya berutang, Aek Marian, September 2020).

Partisipan berikutnya, menjelaskan satu kasus yang berbeda. Berikut penjelasannya.

"I antong utang sapanjang adat dei, pala marsirang tongkinnai baru I bayar. Cuma au tong inda ubayar utang ni mahari baen harani ni kakakmu do na mangulah, ia do mambaen karejo nia, makana u sirangkon. 5 juta nai utang ni mahar I memang, tai baen na mandung mambaen sala kakakmu, inda ro

roangku mambayarna be". (Rahmat Rangkuti, Suami mahar berutang, Dalam Lidang, September 2020).

"Itu utang sepanjang adat, kalau bercerai baru nanti wajib dibayar. Cuma saya tidak mau membayar utang mahar itu karena kakakmu sendiri yang buat ulah, dia sendiri yang nyari masalah (selingkuh), makanya saya ceraikan. Ada 5 juta lagi memang utang maharnya, tapi karena kakakmu yang buat kesalahan ini, tak perduli lagi saya untuk membayar utang maharnya" (Rahmat Rangkuti, Suami mahar berutang, Dalam Lidang, September 2020).

Penjelasan yang diberikan oleh partisipan menarik karena isu baru. Perselingkuhan tidak saja dijadikan sebab bagi perceraian melainkan juga menjadi alasan bagi laki-laki (mantan suami) untuk tidak menunaikan maharnya. Pernyataan yang sama juga penulis dapatkan ketika mewawancarai beberapa partisipan yang menurut mereka, mahar tersebut adalah utang sepanjang adat, walaupun mau dibayar apabila terjadi perceraian diantara mereka. Namun ada juga kasus seorang istri tetap meminta *Tuornya* (maharnya) yang berutang kepada suaminya, padahal mereka belum bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan pelunasan mahar berutang bukan saja terjadi karena perceraian, tetapi juga terjadi pada pasangan yang belum bercerai.

Informasi lain menjelaskan bahwa tuntutan untuk membayar mahar berutang adalah senjata para istri jika terjadi pertengkaran di antara mereka. Berikut informasinya;

"Pala marbadai ami ba, manombo usunggul dobai, bayari utang Tuormi ningku. Tai sampe ari sadarion leng naso dong doba bayarna I baen ia. Anggo utang nia I adong dei 5 juta, isi dei suratna pe" (Sarmiah, istri

maharnya berutang, Dalam Lidang, September 2020).

"Kalau kami bertengkar, kadang saya minta juga utang maharnya, bayar utang maharmu itu, ku bilang sama dia. Tapi sampai hari ini juga belum ada juganya dibayarnya. Kalau utangnya ada 5 juta, ada pake surat juga itu" (Sarmiah, istri maharnya berutang, Dalam Lidang, September 2020).

Informasi di atas menjelaskan pada mulanya mahar berutang hanya sebatas jalan keluar agar perkawinan tetap dapat dilaksanakan kendatipun perkawinan seperti ini bukan sesuatu yang dikehendaki oleh adat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, mahar berutang bukan sebatas jalan keluar, basa-basi, atau menggambarkan sesuatu yang tidak ril. Faktanya, mahar berutang itu bagi para istri adalah hak penuh mereka yang harus ditunaikan suaminya. Penelitian di atas menunjukkan terdapat dua pola tuntutan itu; pertama, istri menuntut pelunasan mahar berutang ketika terjadi perceraian. Kedua, istri menuntut pelunasan sewaktu keduanya masih berada dalam ikatan perkawinan, belum terjadi perceraian sama sekali, namun mahar tetap dituntut baik dalam kondisi damai (bukan pertengkaran) ataupun karena terjadi pertengkaran.

Informasi di atas juga menunjukkan, tuntutan yang diajukan istri tampaknya tidak berbuah hasil. Hal ini disebabkan karena kondisi suami yang memang tak mampu untuk membayar utang itu. Dengan demikian, yang terjadi adalah saling mendingkan atau membiarkan persoalan itu dingin dengan sendirinya. Dan pada kondisi tertentu hal-hal ini dapat saja kembali mencuat kepermukaan.

Berikut penjelasan partisipan:

"Binoto do memang na wajib mahari ibayaran, tai tong anggo naso

mampu do iba aha ibaen pambayarna. Ima dabu kadang mambaen iba pe malosok namartongkari ibagas, mabiar iba i sunggul alak bagas utang mahar nia, gara muse ilala, akhirna manjadi-jadi. Ira-ira tali pangikat doma dabu jiba, tai senjata I sia, pokok na tele anggo soal mahar namarutangi do, na rap ami sipkon dei soni" (Arbain, Suami mahar berutang, Tambangan, Kecamatan Tambangan, September 2020).

"Kita tahu kalau mahar itu wajib dibayari, tapi kalau tak mampu, apa mau dibuat pembayarnya. Itulah kadang makanya saya malas kalau pun bertengkar di rumah, saya khawatir tiba-tiba nanti ditanyanya utang maharnya, saya jadi makin marah menjadi-jadi. Ibaratnya utang ini jadi tali pengikat buat saya, tapi senjata buat dia, pokoknya kalau soal mahar berutang kami sama-sama mendingkan aja modelnya" (Arbain, Suami mahar berutang, Tambangan, Kecamatan Tambangan, September 2020).

Dampak Mahar Berutang

Di dalam masyarakat adat setiap tradisi tentunya memiliki nilai-nilai luhur. Seperti yang dikatakan oleh Usman Lubis, mahar berutang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan rumah tangga di Mandailing, karena hikmah dibalik tradisi ini adalah sebagai pengikat antara suami istri dalam rumah tangga. Suami akan berpikir dua kali apabila ingin menceraikan istrinya karena setelah bercerai pasti utang maharnya akan dituntut istri atau keluarga istrinya. Oleh karena itu dengan mahar berutang maka secara tidak langsung hubungan keluarga diikat agar tetap bersama (Usman Lubis, tokoh masyarakat, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan Kota, 2020).

Selanjutnya, seorang partisipan mengungkapkan :

"Ayah ni si ucok dabu naparholasan, nadenggan pe ibaen na sala sude isia, ima so manombo pala martongkari upangido dei utang ni mahar niai, olo tong pala marepeng ma nida taro na martonga borngin doma mulak mun lopo an, namar kartu sajo ma karejo na isi, marjudi. Aso tong nga goyak roa, adong pe nia tangonan do ia mangabiskonna katimbang kaporluan ni daganak nia, sangape malunasi utang Tuor niai, kan hak niba dei" (Sri Irmayanti, istri maharnya berutang, September 2020).

"Ayah si ucok (suaminya) itu orangnya pemarah, yang baik pun dibuat salah aja semua sama dia, itulah kadang kalau lagi bertengkar saya minta utang maharnya. Dia kalau pas lagi banyak uang mau tengah malam baru balik ke rumah dari kedai kopi itu, main kartu, main judi saja kerjanya disana. Marahlah saya, ada uangnya lebih bagus rasa dia menghabiskannya ketimbang keperluan anak-anaknya, atau melunasi utang maharnya, itu kan hak saya" (Sri Irmayanti, istri maharnya berutang, September 2020).

Informasi diatas menjelaskan bahwa praktik mahar berutang telah menimbulkan ketegangan di dalam keluarga. Kerap terjadi di dalam masyarakat Mandailing dalam kehidupan rumah tangga, adanya konflik berupa pertentangan, ketegangan, perselisihan yang pada akhirnya menjadi sengketa dalam rumah tangga. Kondisi ini semakin parah, ketika konflik itu pada akhirnya berujung pada perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus perceraian antara suami dan istri yang maharnya

adalah mahar berutang yang belum dilunasi sampai akhirnya mereka berpisah. Berikut ini salah satu pernyataan partisipan yang menjelaskan kasus tersebut:

"Waktu na marikahi nalewati, madung dei I sepakati dohot tartulis dei di atas meterai utang mahar ki tano partapakan 10x8 meter. Tai sampe ami marsirang sajongkal tano pe inda dong I lehen kalai pambayar ni utang mahar i. Salolot na rap i ami memang nador an martongkari do ulala dohot ia namarrumah tanggaon, baen naso jop ia roa ni umak nia ami namarikahi, songon na fitnah-fitnah umak nia sajoma sonjia so copat kami marsarak. Sannari dung marsarak kami kawin muse ma ia, tai utang mahar ki naso ibasyar nia dope. Madung do sering i sunggul alak ayah, tai ngadong jawaban ni alai, bahkan na jadi parbadaan doma akhirna. Anggo au ba inda uizinkon i mahar ki dunia akhirat" (Yusrizah, Istri mahar berhtuang, Purba Baru, September 2020).

"Sewaktu menikah dulu, sudah disepakati dan tertulis di atas materai utang mahar itu tanah pertapakan 10 x 8 meter. Tapi sampai kami bercerai sejengkal tanah pun belum ada mereka berikan buat pembayar utang mahar itu. Selama kami bersama pun memang lebih sering kami bertengkar dalam rumah tangga ini, karena ibunya tidak suka kami menikah. Semacam difitnah-fitnah ibunya agar kami cepat bercerai. Sekarang setelah bercerai dia pun kawin lagi, tapi utang maharnya sama aku belum dibayarnya. Sudah sering juga diingatkan ayah untuk meminta utang mahar tersebut, tapi tak ada jawaban mereka, bahkan jadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya. Kalau saya tak ku izinkan maharku itu dunia akhirat"

(Yusrizah, Istri mahar berhtuang, Purba Baru, September 2020).

Informasi yang peneliti dapatkan, ternyata tidak semua kasus mahar berutang ini tidak ada penyelesaian. Kasus yang berikut ini, mantan suami dengan kesadaran melunasi utangnya. Informasi ini diperoleh dari partisipan S, bedanya untuk kasus ini yang menuntut bukan saja oleh mantan istri tetapi keluarga istri juga mengajukan tuntutan yang sama. Berikut informasi yang diberikan partisipan;

"Au madung marsirang mami 3 bulan na lewat, adong dei utang mahar nia 4 juta nalewati, harana 2 juta dontong natarlehen waktu marikahi. Anggo maharna 6 juta, tai di namarsirangon ami tuntutan mahari, tai nian madung ilunasi ia ma ba na 4 juta na inan" (Sariana, Istri mahar berutang, Aek Galoga, Panyabungan Kota, September 2020).

"Saya bercerai 3 bulan yang lalu, ada memang utang maharnya 4 juta lagi, karena baru 2 juta yang dikasihnya waktu menikah itu. Kalau mahar sebenarnya 6 juta, cuma waktu diceraikannya kami tuntutanlah utang maharnya, tapi sekarang sudah dilunasinya sisa utang yang 4 juta itu" (Sariana, Istri mahar berutang, Aek Galoga, Panyabungan Kota, September 2020).

Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang

Dalam perkawinan di lingkungan adat Mandailing, masalah muncul jika terjadi perceraian sedangkan mahar berutang belum juga terbayarkan. Mahar yang tidak disebut di dalam akad, tentu tidak bisa ditunaikan. Namun mahar yang disebut di dalam akad, yang kerap menjadi masalah. Kasus yang peneliti temukan, tercatat ada mahar berutang

sejumlah Rp. 10.000.000,- dan telah ditunaikan pada waktu akad sebesar Rp. 4.000.000,-. Artinya, suami berutang Rp. 6.000.000. Pada kasus lain, ada yang berutang Rp. 10.000.000,-, dan ada juga yang Rp. 5.000.000,-. Jika utang mahar ini tidak diselesaikan, maka akan menimbulkan disharmonisasi di kalangan masyarakat, yang tidak hanya melibatkan antara suami dan istri, tetapi melibatkan kedua keluarga besar. Tidak berhenti sampai disini, konflik itu akhirnya melebar kepada masalah adat yang lebih besar lagi.

Biasanya sebelum kasus ini melebar, masyarakat Mandailing menyelesaikannya dengan cara mengadukannya terlebih dahulu ke pihak *Kahanggi topotan* (orang yang ditunjuk secara adat untuk menjadi perwakilan saudara dari pihak laki-laki di kampung si perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan keluarga laki-laki) dan *akuandar* (saudara pihak laki-laki (*kahanggi*) yang ditunjuk oleh adat sebagai penjamin dalam tidak dapat diterima sebuah pernikahan) di *paradaton* yang telah ditunjuk pada waktu *patibal sere* sesaat sebelum pernikahan. Setelah itu barulah disampaikan kepada tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk kemudian sama-sama dicarikan solusinya. Dalam pandangan adat, perselisihan keluarga tidak boleh seorang istri langsung mengadukannya ke orang tuanya langsung atau ke mertuanya, karena boleh jadi persoalan yang awalnya sepele menjadi masalah besar dengan ikut campurnya kedua orang tua masing-masing.

Merujuk kepada John Burton dalam El (2012), penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*) yang di dalamnya terdapat wewenang dan hukum, dapat dimintakan kepada para pihak oleh kelompok penengah (*mediator*) untuk dilaksanakan. Dalam hal ini pendekatan

tradisional terhadap manajemen dan pengaturan sengketa pada umumnya berdasarkan mediasi dan negosiasi. Pendekatan ini hanya akan berjalan apabila pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk negosiasi dan mempunyai sesuatu yang nyata dapat ditawarkan (EL, 2012). Ketika berhadapan dengan konflik, masyarakat Mandailing sebenarnya menjalani atau memilih diantara strategi penyelesaian sengketa. Mengacu kepada Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (2004) mengemukakan, beberapa strategi penyelesaian sengketa atau konflik, yaitu membawa persoalan ke permukaan atau ke publik atau apa yang disebut dengan *contending* (bertanding). Pilihan lain adalah dengan mendiampkannya atau disebut dengan *yielding* (mengalah). Ada juga mencari penyelesaian bersama yang kemudian menarik diri *with drawing* dari medan konflik (Ihromi, 1993). Sampai akhirnya memilih jalan diam ketimbang tidak ada penyelesaian yang diharapkan.

Terkait dengan mahar berutang, secara hukum tentunya ini adalah masalah perdata utang piutang antara keluarga atau hubungan personal suami dan istri. Namun karena prosesnya dimulai secara adat tentunya juga akan ada penyelesaiannya secara adat apabila terjadi perselisihan atau konflik dalam keluarga tersebut. Pada penelitian ini mencoba melihat bagaimana penyelesaiannya secara adat dengan menguraikan pendapat dan tanggapan para tokoh-tokoh adat di Mandailing Natal.

"Anggo manurut jau doba, inda dong dabo teknis na sanga sonjia manyaloseon masalahi, harana sabotulna pe tong dasar ni alai na kawin lari do, artina na malanggar adat do alai, songon jia mantong mangalehen solusi adat tapi naso iadatan" (Baksan Parinduri, Tokoh Adat Mandailing Natal, 2020).

“Kalau menurut saya ini tak ada teknisnya bagaimana menyelesaikan masalah ini, karena sebenarnya dasar mereka menikah ini pun dengan kawin lari, artinya mereka sudah melanggar secara adat. Bagaimanalah pula cara penyelesaiannya secara adat tapi dasarnya tidak diadatkan” (Baksan Parinduri, Tokoh Adat Mandailing Natal, Oktober 2020).

Peneliti memandang perlu untuk mengemukakan satu pandangan baru yang lebih sistematis. Salah satu partisipan menjelaskan sebagai berikut;

“Anggo pandapotku model ni penyelesaian na on adong tolu, pertama tong ima dohot cara memaafkan, artina si adaboru memaafkon utang mahar ni alak lai niai, napadua na tong ima mangido putusan tu pangadilan anso pengadilan doma mamutuskonna, biasona tong sekaligus dohot putusan perceraian dei, dungi napatolu na ima mediasi secara adat, artina markumpul mei pihak hatobangon sude naipatobang dohot malim-malim mamsyawahkon on. Tai anggo langka na parjolo pala iligi ma sian hata-hata parkobaran di paradatan, tentu antong si adaboru do on na manuntut parjolo, jadi baen na dong dontong kahanggitopotan di kampung ni si adaboru, tu si ma ia parjolo mangadu, baru kahanggitopotan doma mangecekkonna tu hatobangon, dung marpokat kalai, marangkat ma kahanggitopotan songoni hatobangon ima manopot kahanggi si alak lai atau akuandar ni alai i, harana tong akuandar on do sabotulna di angkat na martanggung jawab sude na manyaloseon parsoalan di daganak on pala dong masalah. Jadi rap markumpul mei sude, hatobangon nadong I kampungi songoni juo mora dot

kahanggina (akuandar), anak boru na,baru I putuskon kalai mei sanga sonjia solusina. Biasona tong paling sifatna memaksa si alak lai ma iai, anso I bayar ia utang mahar niai, anggo sanksi adatna pe jarang dei adong, paling tongkinnai I kucilkon alai sakeluarga sian masyarakat sangape inda I pature adat kalai tongkinnai be. Ima sanksina pala inda ra ia mambayarna. Pala inda salose secara adat biasona tu pengadilan domain” (Usman Lubis, tokoh masyarakat, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan Kota, September 2020).

“Menurut pendapatku, model penyelesaiannya ini ada tiga (3), pertama penyelesaiannya dengan cara memaafkan, maksudnya istrinya itu memaafkan suaminya atas utang maharnya. Kedua dengan cara mengadukannya ke pengadilan agama untuk diputuskan, tapi ini biasanya bersamaan dengan putusan perceraian. Ketiga penyelesaian secara adat lewat mediasi. Artinya berkumpul pihak *hatobangon*, *nai patobang*, *malim-malim* untuk memusyawahkannya. Tapi langkah pertama jika dilihat dari isi kata-kata *markobar* di paradatan, tentu si perempuan yang pertama menuntut, lalu dia akan mengadukannya ke *kahanggi topotan*, *kahanggi topotan* akan menyampaikannya ke *hatobangon*. Kemudian setelah mereka musyawarah barulah sama-sama berangkat menuju tempat *kahanggi* si laki-laki (si suami) yaitu *akuandarnya*, serta *sere na godang* anak *borunya*. Lalu di sana akan berkumpul bersama dengan *hatobangon*, *nai patobang* dan *malim-malim* untuk memutuskannya bersama orangtua si laki-laki. Hasilnya biasanya hanya sifat memaksa si laki-laki agar

membayar utang mahar tersebut, kalau sanksi adat sebenarnya tidak ada, paling nanti dikucilkan ataupun tidak dipedulikan secara adat apabila mahar tersebut tidak mau dibayarnya. Kalau secara adat juga tidak selesai, biasanya barulah diadakan penyelesaiannya ke pengadilan agama” (Usman Lubis, tokoh masyarakat, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan Kota, September 2020).

Penjelasan diatas menegaskan bahwa sebenarnya di dalam adat tidak ada mekanisme khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus mahar berutang. Hal ini bisa dimaklumi, mahar berutang pada dasarnya adalah mekanisme darurat untuk menyelesaikan kasus kawin lari (*Marlojong*) yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing. Namun secara umum, setiap ada masalah, adat atau hukum adat memiliki ketentuan umum bagaimana persoalan itu bisa diselesaikan. Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa adat memang menyediakan mekanisme musyawarah untuk penyelesaian kasus secara bertingkat. Namun di dalam adat tidak ada sanksi yang spesifik yang sudah berlaku. Setidaknya, jika keluarga laki-laki tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut, maka mereka akan mendapatkan sanksi moral dari masyarakat, yakni dipandang sebagai orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Secara teoritik memang, hukuman moral atau hukuman adat yang tidak tertulis ini terasa lebih berat dari hukuman yang diberikan oleh pengadilan.

Kasus Mahar Berutang di Pengadilan Agama

Di atas peneliti telah menjelaskan bagaimana penyelesaian kasus mahar berutang yang menggunakan jalur adat atau musyawarah. Penelitian ini juga

menunjukkan terdapat model penyelesaian kasus mahar berutang lewat pengadilan. Adapun pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa mahar berutang tersebut ialah pengadilan Agama. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 mendefinisikan Pengadilan Agama sebagai salah satu tempat kekuasaan kehakiman untuk masyarakat yang memeluk agama Islam yang mencari keadilan beragama (Wirhanuddin, 2014). Meskipun mahar berutang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Dahlan, 2001; Muhammad, 2013).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini telah dijadikan produk hukum di Indonesia dengan pengesahannya melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terkait dengan kewenangan pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus mahar berutang tersebut secara eksplisit didasarkan pada Pasal 37 KHI yang berisi pernyataan: “Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama” (dalam Supardin, 2014).

Sepanjang tahun 2010-2020, peneliti menemukan satu kasus penyelesaian sengketa mahar berutang di Pengadilan Agama Panyabungan, nomor 192/Pdt.G/2010/PA.Pyb dengan perkara pokok tentang cerai gugat yang dikomulasikan dengan gugatan tentang kekurangan mahar. Pada gugatan tambahan (kumulasi) Penggugat mengajukan gugatan mahar berbentuk

perjanjian utang *Tuor* yang dibuat dalam akta perjanjian tersendiri (akta bawah tangan). Konteks perjanjian tersebut salah satunya adalah bahwa Tergugat (suami) telah berutang *Tuor* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selain itu, dalam isi perjanjian tersebut utang *Tuor* akan dilunasi tanpa batas waktu yang jelas atau sepanjang adat.

Dalam proses persidangan Tergugat (suami) mengakui keberadaan perjanjian tersebut, namun ia tidak bersedia melunasi sebab perjanjian tersebut berlaku sepanjang adat dan lagi pula mahar yang disebut dalam buku nikah adalah seperangkat alat shalat yang telah dibayar tunai. Sehingga berdasarkan dalil bantahan Tergugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perjanjian tersebut bukan termasuk mahar menurut hukum Islam, meskipun dalam istilah adat juga digunakan kata-kata "mahar", namun yang dimaksud mahar dalam suatu pernikahan menurut hukum Islam adalah yang disebutkan saat pelaksanaan akad ijab qobul.

Pada pertimbangan ini majelis hakim juga menyatakan bahwa meskipun Tergugat juga mengakui adanya utang mahar secara adat (*Tuor*) tersebut kepada Penggugat, namun secara formil utang piutang yang terjadi berdasarkan hukum adat tersebut tidak termasuk kepada kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, di samping itu surat perjanjian tertulis tentang utang mahar secara adat tersebut tidak memuat keterangan yang jelas dan pasti tentang kapan waktu jatuh tempo pelunasan utang tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat, kecuali hanya menyebutkan harus dilunasi sepanjang adat, oleh sebab itu, gugatan Penggugat tentang utang mahar secara adat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*).

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa ada dua ketentuan tentang sengketa *Tuor* diantaranya sebagai berikut: (a) Apabila *Tuor* yang dimaksud masih terutang dengan perjanjian akta bawah tangan atau secara adat dan tidak dicantumkan dalam buku nikah sebagai mahar tidak dapat diselesaikan atau diperkarakan di Pengadilan Agama. Hal ini merujuk pada kompetensi absolut pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, sedangkan perjanjian secara adat dengan akta bawah tangan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Negeri). (b). Apabila *Tuor* dicantumkan dalam buku nikah sebagai mahar yang terutang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, karena secara universal menjadi kesatuan dari akta otentik pernikahan yang dapat diselesaikan sebagai bagian dari perdata Agama (Pengadilan Tinggi Agama Medan, 2016).

SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa Perkawinan dengan mahar berutang pada masyarakat Mandailing Natal pada dasarnya dilakukan pada perkawinan *Marlojong* (kawin lari). Pada dasarnya, mahar berutang pada masyarakat Mandailing Natal bertujuan positif yaitu untuk mengikat hubungan rumah tangga antara suami dan istrinya agar tetap bersama selamanya. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa mahar berutang adalah sumber konflik yang tidak hanya melibatkan suami istri tetapi juga melibatkan dua keluarga besar. Ketika mahar berutang melahirkan konflik, maka jalan keluar yang ditempuh adalah 3 (tiga) model penyelesaian. *Pertama*, Istri atau pihak perempuan memaafkan utang mahar suami. *Kedua*, Membawa kasus ke Pengadilan Agama bersamaan dengan gugatan perceraian. *Ketiga*, penyelesaian secara adat, yaitu pihak istri mengadukannya ke pihak *kahanggi*

topotan, yang selanjutnya diselesaikan melalui mekanisme adat. Namun adat tidak mengatur secara spesifik jenis hukuman yang akan diterapkan. Namun pastinya hukuman moral sosial akan diperoleh suami dan keluarganya jika tidak menyelesaikan kasus mahar berutangnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bagi masyarakat Mandailing Natal dalam kaitannya dengan mahar berhutang, perlu diberikan pemahaman bahwa mahar berhutang tersebut bukanlah hutang sepanjang adat, tapi hutang perdata yang wajib dibayar secara hukum. Dengan demikian hak istri terhadap maharnya tidak terabaikan sepanjang pernikahan dan harus menunggu perceraian atau kematian barulah dilunasi. Selain itu, dalam hal utang piutang, termasuk dalam utang piutang mahar, hendaknya masyarakat Mandailing membuat perjanjian yang memiliki kepastian hukum yang dapat diproses demi menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan apabila mantan suami tidak melunasi mahar berutang tersebut. Adapun cara untuk mendapatkan kepastian hukumnya ialah dengan mencantumkan mahar berutang tersebut ke dalam akta nikah agar dapat diproses di Pengadilan Agama ataupun membuat perjanjian secara adat dengan akta bawah tangan menggunakan materai agar dapat diproses di Peradilan Umum (Negeri).

Para tokoh adat juga kedepannya perlu memperhatikan persoalan mahar berhutang, terkhusus dalam hal penyelesaiannya secara adat. Sehingga hukum adat tetap disegani masyarakat, karena konsekuensinya secara adat pun dapat diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya mungkin perlu diteliti tentang *tuor* (mahar) secara adat dalam tinjauan hukum Islam, sehingga hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran

Islam, maka adat tersebut ditinggalkan atau dimodifikasi agar sejalan dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akapress.
- Arbain, Suami mahar berhutang, Tambangan, Kecamatan Tambangan. (2020). *wawancara pribadi*.
- Baksan Parinduri, Tokoh Adat Mandailing Natal, M. (2020). *wawancara pribadi*.
- Dahlan, et al. (2001). *Ensiklopedi hukum Islam*. Jilid 2, Cet. V. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Duwila, R. (2018). *Tinjauan Hukum Pemberian Mahar Nikah Tidak Sesuai dengan yang Tercantum dalam Surat Nikah Menurut Hukum Islam dikaitkan dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Padjajaran.
- EL, F. A. S. (2012). *Kerangka Teoritik Penyelesaian Konflik*. Associate Professor, Departement of Political Sciences Islamic, Revelead Knowledge and Human Science International Islamic University.
- Fahmi Nasution, Maharnya berhutang, Aek Marian, K. N. (2020). *Hasil Wawancara*.
- Haar, B. T. (1962). *Adat Law Indonesia*. Bathara.
- Halimah, B. (2015). *Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer*. 15, 161–180.
- Halimah, B. (2017). *M 310 -*. 6(2), 310–330.
- Halomoan, P. (2016). Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>
- Hasnul Arifin Nasution Tokoh Adat di Mandailing Natal. (2020). *Hasil wawancara*.
- Ihromi, T. O. (1993). *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor.
- Khairani, L. (2019). MANGALEHEN TUOR: Fenomena Living Hadis dalam Adat Mandailing. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 1(1). <https://doi.org/10.15548/mashdar.v1i1.210>
- Khoililul Yaqin Naution Tokoh Adat Mandailing Natal. (2020). *Hasil wawancara*.
- Kohar, A. (2016). Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *Asas: Jurnal Politik, Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 42–50. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asa/s/article/view/1245/985>
- Mangaraja Pinayungan Pulungan Tokoh adat Mandailing Natal. (2020). *Hasil wawancara*.
- Manik, H. . (2012). Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya. *BioKultur*, 1(1), 19–32.

- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Muali Lubis Tokoh Masyarakat Mandailing Natal. (2020). *Hasil Wawancara*.
- Muhammad, A. (2013). Beberapa perlakuan diskriminatif terhadap peradilan agama. *Varia Peradilan*, 40.
- Noor, E. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Mahar yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 178/Pdt-G/2013/MS-Bir). *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara: Premise Law Jurnal*, 1-14.
- Pengadilan Tinggi Agama Medan. (2016). *Kedudukan Tuor Dalam Adat Perkawinan Mandailing dan Kaitannya dengan Perjanjian Perkawinan*. Pengadilan Tinggi Agama Medan. <https://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-043757/artikelanda/870-kedudukan-tuor-dalam-adat-perkawinan-mandailing-dan-kaitannya-dengan-perjanjian-perkawinan>
- Pruitt, D. G. & J. Z. R. (2004). *Konflik Sosial*. Pustaka Belajar.
- Rahmat Rangkuti, Suami mahar berhutang, Dalam Lidang, P. kota. (2020). *Hasil wawancara*.
- Sariana, Isteri mahar berhutang, Aek Galoga, Panyabungan Kota. (2020). *wawancara pribadi*.
- Sarmiah, isteri maharnya berhutang, Dalam Lidang, P. K. (2020). *wawancara pribadi*.
- Sogopan Siregar, Kepala Kantor KUA Siabu, M. N. (2020). *Hasil wawancara*.
- Sri Irmayanti, isteri maharnya berhutang, S. (2020). *wawancara pribadi*.
- Sudiyat, I. (1962). *Hukum Adat dan Sketsa Asas*. Bhatara.
- Supardin. (2014). *Fikih peradilan agama di Indonesia. Cet. I*. University Press.
- Usman Lubis, tokoh masyarakat, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan Kota. (2020). *Hasil Wawancara*.
- Wilpa, R. (2012). *Kedudukan Tuor Dalam Adat Perkawinan Mandailing dan kaitannya dengan Perjanjian Perkawinan*. Pengadilan Tinggi Agama Medan.
- Wirhanuddin. (2014). *Mediasi perspektif hukum Islam*. Fatawa Publishing.
- Yusrizah, Isteri mahar berhutang, Purba Baru, L. S. M. (2020). *wawancara pribadi*.